

BAB V

**PERAN ORGANISASI KERJASAMA ISLAM TERHADAP
ISLAMOPHOBIA DI PRANCIS**

5.1 Organisasi Kerjasama Islam

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) disebut sebagai organisasi yang unik dengan tujuan utama untuk meningkatkan “solidaritas Islam” di antara negara-negara anggota. OKI didirikan pada September 1969, diawali dengan seruan dari mantan Mufti Yerusalem ke semua negara Islam untuk bergabung dalam sebuah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Islam pertama yang diadakan di Rabat, Maroko. KTT tersebut diadakan sebagai respon atas terhadap serangan pembakaran Masjidil Aqsa di Yerusalem. Pertemuan bersejarah ini sangat berperan dalam pembentukan OKI, dan solidaritas Islam menjadi sarana untuk meningkatkan kerjasama dan pertukaran antarnegara-negara Islam. Pada 1971, Konferensi Menteri Luar Negeri antarnegara Islam secara resmi menetapkan OKI dengan menyetujui sebuah Piagam yang mayoritas negara-negara anggota telah mengesahkan pada 1973.⁸⁶

Berdasarkan Piagam tersebut, tujuan OKI adalah:

- 1.) Memperkuat solidaritas Islam di antara negara-negara anggota;
- 2.) Mengkonsolidasikan kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial,

⁸⁶ Devon A. Hansen and Mohammad Hemmasi. *The State of the Organization of the Islamic Conference (OIC) at the dawn of the new millenium on Prairie Perspectives: geographical Essays*. Vol 4. Ed. Douglas C. Munski. 2001: university of North Dakota . hlm. 259.

budaya dan sains, untuk melindungi martabat, kemerdekaan, dan hak-hak nasional masyarakat muslim;

3.) Menjamin keamanan terhadap tempat-tempat suci dan mendukung perjuangan rakyat Palestina;

4.) Menghilangkan diskriminasi rasial dan segala bentuk kolonialisme;

5.) Mempromosikan kerjasama dan pemahaman antara negara anggota dan pihak lainnya.⁸⁷

Piagam OKI juga menegaskan bahwa misinya adalah untuk mempromosikan nilai-nilai Islam, memperkuat solidaritas di antara negara-negara muslim, terus memberikan dukungan untuk kemerdekaan Palestina, membela kedaulatan negara anggota, membantu komunitas muslim yang berada di luar yurisdiksi negara-negara anggota, mempresentasikan aspirasi muslim di kancah internasional demi tercapainya kepentingan bersama, mempertahankan citra Islam, dan untuk memerangi penghinaan terhadap Islam. piagam OKI juga menekankan aspek perdamaian, kasih sayang, toleransi, kesetaraan, keadilan, dan martabat manusia. Piagam OKI juga bertekad untuk melawan terorisme.⁸⁸

Seiring dengan penerapan poin-poin dalam piagam, OKI telah diberi mandat untuk menangani berbagai masalah; perdamaian dan resolusi

⁸⁷ *Ibid*, hal 260.

⁸⁸ Deborah Weiss. *The Organization of Islamic Cooperation's Jihad on Free Speech*. Civilization Jihad Reader Series. Vol 3. 2015. United States: Center for Security Policy Press. Hlm. 15.

konflik, isu-isu minoritas Muslim, hak-hak perempuan dan anak-anak, bantuan kemanusiaan, memerangi islamophobia, promosi perdagangan dan investasi intra-OKI, serta pertukaran budaya dan pendidikan. Piagam tersebut juga menyebutkan prinsip-prinsip yang mengatur program OKI agar berjalan atas dasar: kesetaraan penuh di antara negara-negara anggota; mendukung hak penentuan nasib sendiri dan tidak adanya campur tangan dalam urusan internal negara anggota; dukungan untuk kedaulatan, independensi dan integritas teritorial masing-masing negara anggota; dan penyelesaian sengketa dengan cara damai seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.⁸⁹

Kantor pusat OKI sendiri terletak di Jeddah, Arab Saudi. Sekretaris Jenderal OKI saat ini adalah seorang berkebangsaan Arab Saudi, Yusuf bin Ahmad Al-Utsaimin yang mulai menjabat sejak 17 November 2016, menggantikan Iyad bin Amin Madani. OKI hingga kini telah memiliki 57 negara anggota.⁹⁰ Berdasarkan laporan penelitian statistik, ekonomi, dan sosial dari sebuah organisasi di bawah naungan OKI yang berlokasi di Ankara, Turki, data sensus 2010 memperkirakan jumlah populasi di negara-negara anggota OKI berkisar 1,563 miliar jiwa, atau sebanding

⁸⁹ M Ihsan Qadir and M. Saifur Rahman. *Organization of Islamic Co-operation (OIC) and Prospects of Yemeni Conflict Resolution: Delusion or Plausible Reality*. Journal of Political Studies, vol. 22, issue-2 2015. University of Punjab. Hlm. 369-370. Diunduh dari <http://pu.edu.pk>

⁹⁰ Elizabeth H. Prodromou. *What is The Organization of Islamic Cooperation?* 2013. Center for European Studies. Harvard University. Diunduh dari www.globalgovernancewatch.org Hlm. 1.

dengan 22,7% dari populasi dunia.⁹¹ Sedangkan organisasi internasional seperti Liga Negara-negara Arab, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Gerakan Non-Blok, dan Uni Afrika juga memainkan statusnya sebagai pengamat di OKI.

Nama “Organisasi Kerjasama Islam” adalah suatu perubahan yang dicanangkan dalam pertemuan tingkat Menteri ke-38 di Astana, Kazakhstan pada Juli 2011, setelah sebelumnya organisasi ini berdiri dengan nama “Organisasi Konferensi Islam.” Perubahan ini diprakarsai oleh pemerintah Arab Saudi yang mempertemukan kepala negara dan pemerintahan muslim dari berbagai penjuru dunia dalam Konferensi Tingkat Tinggi Islam di Rabat, Maroko.⁹² Perubahan ini bukan semata perubahan nama, namun perubahan ini juga mencerminkan niat OKI untuk terlibat lebih serius dengan meningkatnya jumlah actor dalam masyarakat global yang semakin saling bergantung. OKI diharapkan mampu berkontribusi secara efektif pada pencegahan, pengelolaan, dan penyelesaian konflik di dunia.⁹³

Institusi seperti OKI tidak terbentuk hanya untuk mengatasi masalah politik namun juga terbentuk karena adanya perasaan yang sama seakan telah dimusuhi, diabaikan, tidak aman, dan dirampas hak-haknya.

⁹¹ *Ibid*, hal 1.

⁹² *Ibid*

⁹³ Arhama Siddiq. *the Utility of the OIC in Solving Conflicts in the Muslim World* an issue brief of Institute of Strategic Studies. 2016. Hlm. 2. Diunduh dari www.issi.org.pk

Perasaan ini muncul akibat proses yang cepat dalam tahapan modernisasi dan politik internasional. Maka jaringan atau wadah persatuan yang muncul seperti OKI dianggap sebagai suara potensial bagi dunia muslim. Suara yang diperlukan untuk mengeluarkan ide dan pemikiran umat Islam demi mencapai perdamaian, keadilan, serta persamaan.

Organisasi yang beranggotakan negara-negara muslim atau negara berpenduduk mayoritas muslim ini kemudian memosisikan dirinya sebagai suara kolektif bagi muslim di seluruh dunia. Organisasi ini memiliki dimensi keagamaan yang kuat yang membedakannya dari organisasi intergovernmental yang lain. Agenda-agenda yang menjadi prioritas utamanya antara lain meliputi penanganan fenomena islamophobia; mempromosikan kepentingan muslim di penjuru dunia; dan konsolidasi, koordinasi, serta kolaborasi antarnegara Islam dalam forum internasional.⁹⁴

Dalam upaya mencapai berbagai tujuan pembentukannya, organisasi ini telah mengembangkan hubungan dengan banyak actor lain selain negara anggota. Hubungan tersebut telah terjalin sejak OKI dipimpin oleh Ekmeleddin Ihsanoglu yang menjabat selama sembilan tahun sejak 2005 sampai 2014. Sebagai contoh ialah OKI telah memiliki peran di PBB.

⁹⁴ Pekka Hakala and Andreas Kettis. *the Organization of Islamic Cooperation: Defined – for better and Worse – by its religious dimension*. Policy Department, Directorate-General for External Policies. This Policy Briefing was requested by the European Parliament's Committee on Foreign Affairs. 2013. Hlm 3.

Organisasi ini memiliki kantor di Jenewa dan New York dan mengadakan rapat koordinasi tahunan untuk para menteri luar negeri dalam kaitannya dengan Majelis Umum PBB, yang membahas, antara lain, sikap negara anggota terhadap berbagai inisiatif Hak Asasi Manusia (HAM).

Secara umum, keterlibatan negara anggota OKI dalam PBB berpusat pada isu-isu seperti hak keluarga dan penghinaan terhadap agenda agama, selain terlibat dalam perjuangan palestina. Selain itu, OKI juga telah melakukan hubungan yang lebih erat dengan Uni Eropa, hal ini diperkuat dengan berdirinya kantor penghubung di Brussels untuk mendorong hubungan yang lebih dekat dengan Uni Eropa. Misi tetap OKI ke Uni Eropa telah diresmikan di hadapan Sekretaris Jenderal Ihsanoglu pada 25 Juni 2013. Duta Besar Azerbaijan untuk Uni Eropa, Arif Mammadov, ditunjuk sebagai observer permanen OKI, dan Mehmet Bilir, seorang diplomat Turki, ditunjuk sebagai wakilnya.

5.1.1 Struktur OKI

a. Badan-Badan dalam OKI

1.) *Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) :*

KTT Islam merupakan otoritas tertinggi dalam organisasi. Sebuah konferensi yang diadakan setiap tiga tahun sekali dan dihadiri oleh kepala negara atau kepala pemerintah dari negara anggota. Konferensi ini diadakan untuk merumuskan, mengambil keputusan kebijakan, dan setelah itu memberikan bimbingan mengenai semua isu yang berkaitan

dengan realisasi tujuan serta mempertimbangkan isu-isu lain yang menjadi perhatian negara-negara anggota.

2.) Dewan Menteri Luar Negeri :

Dewan Menteri Luar Negeri merupakan pertemuan para menteri luar negeri dari seluruh negara anggota. Dewan melakukan pertemuan setahun sekali, Dewan ini mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan umum OKI. Dewan juga meninjau tahapan dalam penerapan keputusan dan resolusi yang diadopsi oleh konferensi ini dan KTT Islam.

3.) Komite Eksekutif :

Komite Eksekutif memegang kekuatan pengambilan keputusan antara pertemuan para menteri. Komite ini dibentuk pada 2005 untuk meningkatkan kemampuan OKI agar bertindak lebih cepat dan efektif bagi negara-negara anggotanya mengenai hal-hal yang menjadi perhatian internasional.

4.) Komite Perwakilan Tetap :

Komite Perwakilan Tetap yang terdiri dari duta besar negara anggota yang terakreditasi untuk OKI.

5.) Sekretariat Jenderal :

Sekretaris Jenderal yang merupakan badan eksekutif yang menerapkan keputusan dalam pembuatan keputusan politik. Dipimpin oleh seorang sekretaris Jenderal dan berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi.⁹⁵

⁹⁵ Pekka Hakala and Andreas Kettis. *the Organization of Islamic Cooperation: Defined –*

Sekretaris Jenderal OKI bertanggung jawab atas hal-hal berikut:

- a. Memberikan perhatian pada badan organisasi;
- b. Menindak lanjuti keputusan, resolusi, dan rekomendasi dari KTT Islam, Dewan Menteri Luar Negeri, dan pertemuan menteri lainnya;
- c. Mengkoordinasikan dan menyelaraskan pekerjaan organ yang relevan dari organisasi;
- d. Menyiapkan program dan anggaran kesekretariatan OKI;
- e. Mengembangkan komunikasi antarnegara anggota dan memfasilitasi konsultasi dan pertukaran pandangan serta penyebaran informasi yang bisa menjadi sangat penting bagi negara-negara anggota;
- f. Menyampaikan laporan tahunan kepada Dewan menteri Luar Negeri; dan
- g. Melakukan fungsi lain seperti yang dipercayakan oleh KTT atau Dewan Menteri Luar Negeri.⁹⁶

Sejumlah organ dan institusi sekunder telah dikembangkan untuk mencapai tujuan OKI di berbagai bidang yang meliputi budaya, sains, ekonomi, legislasi, keuangan, olahraga, teknologi, pendidikan dan media, serta topik kejuruan, sosial, serta kemanusiaan.

for better and Worse – by its religious dimension. Policy Department, Directorate-General for External Policies. This Policy Briefing was requested by the European Parliament's Committee on Foreign Affairs. 2013. Hlm 5.

⁹⁶ *Ibid*, hal 5.

5.1.2 Anggota OKI

a) Member State

OKI hingga kini telah memiliki 57 negara anggota. Negara-negara tersebut dapat dikatakan perwakilan dari empat benua, yaitu Asia (28 negara), Afrika (26 negara), Amerika Selatan (2), dan Eropa (1).⁹⁷

b) Observers

Selain negara anggota, OKI juga memiliki Observers (para pengamat) yang meliputi negara-negara, yaitu Bosnia and Herzegovina (1994), Central African Republic (1996), Kingdom of Thailand (1998), The Russian Federation (2005), Turkish Cypriot State (1979); komunitas muslim berupa Moro National Liberation Front (1977); institusi Islam berupa Parliamentary Union of the OIC Member States (PUOICM) (2000); selain itu berbagai organisasi internasional juga berperan sebagai pengamat OKI, meliputi United Nations (UN) (1976), NonAligned Movement (NAM) (1977), League of Arab States (LAS) (1975), African Union (AU) (1977), Economic Cooperation Organization (ECO) (1995).⁹⁸

5.1.3 OKI dalam Ranah Global

Ketika membicarakan bagaimana pencapaian OKI di ranah global, sepatutnya membicarakan bagaimana keberhasilan dan kegagalan OKI dalam menangani berbagai konflik. Keberhasilan dan kegagalan tersebut dapat dilihat dalam konteks dua dimensi yang saling terkait:

⁹⁷ Organization of Islamic Cooperation. www.oic-oci.org

⁹⁸ *Ibid*

(1) mempromosikan keamanan dan kesejahteraan negara anggota dan masyarakat; dan

(2) menyelesaikan sengketa atau konflik politik.

Kehadiran OKI dianggap sebagai prestasi yang luar biasa. Pembentukan OKI yang berdasarkan atas konsep identitas ummah, mencerminkan keinginan antarumat muslim untuk bersatu, terlepas dari perbedaan politik, ekonomi, budaya, maupun ras. Namun komitmen negara anggota atas kedaulatan nasional kerap kali menghambat kerjasama antar-anggota. Hal ini dikarenakan beberapa dari mereka menganggap bahwa kerjasama akan menghambat kepentingan nasional mereka. Maka dapat dilihat bahwa pencapaian dan kelemahan OKI tampaknya menunjukkan bagaimana “nasionalisme” telah memainkan peran lebih besar daripada rasa “persaudaraan Islam” dalam keputusan negara-negara anggota. Perbedaan kepentingan nasional negara-negara anggota lah yang kemudian menjadi hambatan OKI dalam upaya mencari solusi untuk berbagai perkara.⁹⁹

Dalam penyelesaian damai atas perselisihan antarnegara, Piagam OKI menggambarkan bagaimana organisasi ini berperan untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul, dengan cara damai seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, serta arbitrase. Mengenai hal ini, OKI telah melakukan intervensi dalam berbagai perselisihan, di antaranya: Perselisihan

⁹⁹ Devon A. Hansen and Mohammad Hemmasi. *The State of the Organization of the Islamic Conference (OIC) at the dawn of the new millenium on Prairie Perspectives: geographical Essays*. Vol 4. Ed. Douglas C. Munski. 2001: university of North Dakota. Hlm. 276.

Pakistan-Bangladesh pada 1971-1974; konflik Iran-Irak pada 1980-1988; Perselisihan Senegali-Mauritania pada 1989; konflik Iraq-Kuwait pada 1990-1991; serta perang sipil di Afghanistan sejak 1989.¹⁰⁰

Pada hakikatnya, OKI selalu berusaha menyelesaikan konflik antaranggotanya dengan cara damai. Pada tahun-tahun awal terbentuk, OKI tampil baik dalam hal resolusi konflik, terutama saat bertindak sebagai perantara antara Palestine Liberation Organization (PLO) dan Yordania, serta antara Bangladesh dan Pakistan. Namun pada awal 1980an, organisasi ini gagal membujuk Iran dan Irak untuk mematuhi usulan Komite Perdamaian Islam agar menyelesaikan konflik secara damai. Kegagalan selanjutnya juga terlihat dari peran OKI yang memfasilitasi upaya perdamaian di wilayah selatan Mindanao antara Republik Filipina dan Moro National Liberation Front (MNLF) yang sayangnya tidak mengarah kepada pelaksanaan perjanjian perdamaian.

OKI mungkin tidak mampu memaksakan posisinya pada pihak-pihak yang saling bertentangan melalui kekerasan, namun pengaruh moralitasnya telah dinilai efektif, misalnya dalam kasus Deklarasi Mekkah pada 2006 antara pemimpin Sunni dan Syiah di Irak. OKI juga mampu berperan sebagai mitra yang berguna bagi PBB dan organisasi internasional lainnya seperti Uni Eropa, Uni Afrika, Liga Arab, dan mampu memainkan peran pelengkap, terutama dengan menjadi mediator

¹⁰⁰ *Ibid*, hal 278.

antara negara anggotanya atau pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di dalam negara anggota.

Tantangan nyata bagi OKI adalah untuk menjadi mediator yang berkelanjutan dan lebih sistematis. Untuk dapat menjalankan tantangan itu, OKI perlu mengenali tanggung jawabnya. OKI harus mengakui tugasnya kepada negara anggotanya dengan memberikan kontribusi terhadap solusi atas konflik yang terjadi. OKI harus menyadari bahwa berperan sebagai mediator tidak semata-mata mendamaikan negara-negara yang berkonflik tapi juga berusaha untuk mencapai kepentingan jangka panjang. Maka dengan begitu, OKI dapat membuktikan fungsinya sebagai forum yang pantas bagi negara anggota untuk bertemu dan bekerja sama serta menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi.

OKI menjadi penting bagi hukum internasional dan kebebasan agama dalam lingkup global dikarenakan Piagam OKI dianggap kategoris dalam misi inti organisasi internasional untuk mempersatukan umat dan mengedepankan kepentingan ummat. Piagam OKI telah memperlihatkan bahwa negara-negara anggota OKI telah berkomitmen untuk sepakat dan patuh pada tujuan dan prinsip Piagam PBB.

OKI terus mengupayakan komitmennya secara konsisten. Contohnya pada KTT ke-10 OKI yang diadakan di Putrajaya, Malaysia, pada 11-17 Oktober 2003, OKI berkomitmen untuk menjadi sebuah badan yang siap dalam menjawab tantangan di abad ke-21, terutama dalam aspek-aspek

perampingan struktur, metodologi, peningkatan kemampuan keuangan, serta sumber daya manusia. Menindaklanjuti KTT tersebut, maka pada KTT Luar Biasa OKI yang ke-3 di Makkah, Arab Saudi, disepakatilah Macca Declaration dan OIC Ten Year Program of Action (TYPOA) yang meliputi restrukturasi dan reformasi OKI, termasuk perumusan Piagam OKI yang baru.

Instrumen Program aksi sepuluh tahun yang diadopsi oleh kepala kepala negara dan pemerintahan OKI pada 2005 menjadi sebuah reformasi institusional. Piagam tersebut dikembangkan dengan kesadaran akan potensi bagi dunia muslim untuk menuju suatu kebangkitan, dan untuk mengambil langkah-langkah menuju konsolidasi koneksi persatuan Islam, mencapai kesatuan tingkat, dan memproyeksikan citra positif dan nilai-nilai luhur Islam.

Kemudian pada KTT ke-11 OKI di Senegal pada Maret 2008 yang bertemakan “The Islamic Ummah in the 21st Century” diputuskanlah Piagam baru OKI dengan harapan mampu mencapai suatu kesepakatan politik serta mampu menjadi suatu organisasi internasional yang dapat mengutamakan kepentingan umat Islam dan dapat memperjuangkannya di ranah global.¹⁰¹

5.1.4 OKI dan HAM

Secara historis, OKI belum mengenal perannya dalam

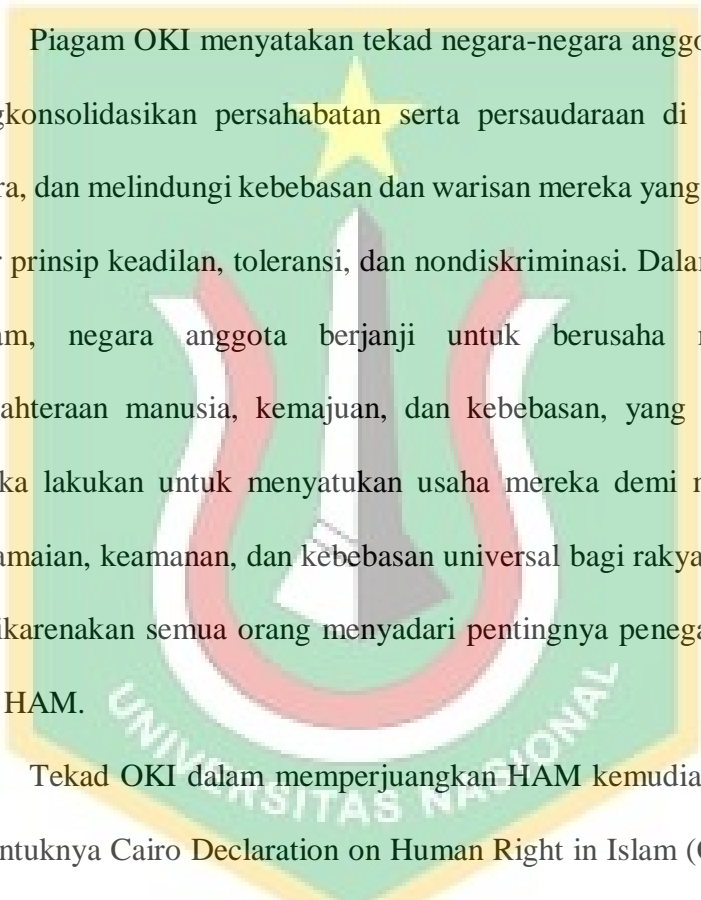
¹⁰¹ Informasi singkat tentang organisasi kerjasama Islam dan konferensi tingkat tinggi OKI tentang peran perempuan dalam pembangunan. Diunduh dari <https://www.oic-oci.org>

perlindungan dan promosi HAM dengan keterlibatannya di PBB. OKI telah terlibat diskusi tentang HAM, namun belum menjadi topik yang didalami oleh organisasi tersebut. Pada dasarnya, tidak ada yang menentang kombinasi HAM dengan Islam.

Namun, konsepsi mengenai HAM dan Islam yang telah dideklarasikan dalam Deklarasi Kairo dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip penting Deklarasi PBB mengenai hak asasi itu sendiri. Dalam deklarasi Kairo, tidak mencantumkan hak manusia secara universal, namun deklarasi justru secara tegas didasarkan pada nilai-nilai Islam, sebagaimana dinyatakan: “semua hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam deklarasi tunduk pada syariah Islam.” pernyataan ini dinilai telah merampas nilai HAM itu sendiri.

Bagi para cendekiawan, pendekatan mengenai HAM dapat dilihat dari dua sisi berbeda, yaitu dari sisi universalis dan sisi relativis. Universalis melihat HAM sebagai seperangkat hak hukum yang tidak dapat dicabut, atau hak-hak dimana masyarakat bertanggung jawab untuk melindungi dan menegakkannya. Dalam sistem internasional saat ini, setiap orang berhak atas haknya karena mereka telah menyetujui standar HAM PBB, menerima instrumen PBB, dan seringkali memasukkan nilai HAM tersebut ke dalam sistem hukum domestik. Di sisi lain, relativis melihat HAM sebagai perpanjangan nilai-nilai moral yang berakar pada budaya masyarakat atau agama. Relativis berpendapat bahwa HAM harus

mencerminkan masyarakat, dengan mempertimbangkan ciri khas nasional, sejarah, budaya, dan agama. Maka OKI, sebagai suara muslim dunia, kerap mengalami dilemma antara universalis dan relativis. Skema HAM dalam OKI telah mencoba memasukkan kedua sisi tersebut, namun sayangnya justru kerap mengalami inconsistent.¹⁰²



Piagam OKI menyatakan tekad negara-negara anggota OKI untuk mengkonsolidasikan persahabatan serta persaudaraan di antara warga negara, dan melindungi kebebasan dan warisan mereka yang didirikan atas dasar prinsip keadilan, toleransi, dan nondiskriminasi. Dalam pembukaan piagam, negara anggota berjanji untuk berusaha meningkatkan kesejahteraan manusia, kemajuan, dan kebebasan, yang mana hal itu mereka lakukan untuk menyatukan usaha mereka demi mengamankan perdamaian, keamanan, dan kebebasan universal bagi rakyat mereka. Hal ini dikarenakan semua orang menyadari pentingnya penegakan martabat serta HAM.

Tekad OKI dalam memperjuangkan HAM kemudian terlihat dari terbentuknya Cairo Declaration on Human Right in Islam (CDHRI) yang merupakan deklarasi negara-negara anggota OKI yang diadopsi di Kairo pada 1990. Deklarasi tersebut memberikan gambaran tentang perspektif

¹⁰² Turan Kayaoglu. *The OIC's Independent Pemanent Uman Rights Commission: An EarlyAssessment*. 2015. Danish Institute for Human Rights. Hlm. 12.

Islam mengenai HAM dan menegaskan syariah sebagai sumber utamanya. CDHRI memperlihatkan fungsinya sebagai pedoman umum bagi negara-negara anggota di bidang HAM. Banyak anggota OKI yang mengkritik Deklarasi Universal HAM atas kegagalannya untuk memperhitungkan konteks budaya dan agama pada negara-negara non-Barat.¹⁰³

Aksi penegakan HAM oleh OKI selanjutnya juga terlihat dalam suatu deklarasi bernama Macca Declaration dan OIC Ten Year Program of Action (TYPOA) yang terbentuk pada 2005. Deklarasi tersebut mengenalkan konsentrasi yang jelas mengenai HAM secara universal dan pentingnya mengutamakan HAM ke dalam semua program. Maka untuk menegakkan nilai-nilai HAM, OKI diharapkan mampu memperbaharui penekanan pada demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi politik, serta penghormatan terhadap hak-hak manusia untuk menghadapi tantangan marjinalisasi umat lanjutan, juga menawarkan stabilitas yang didasari dengan pengembangan dan kemajuan. Program aksi sepuluh tahun ini menuntut OKI untuk mempertimbangkan pendirian sebuah badan independen permanen untuk mendukung nilai-nilai HAM.

Setelah itu, berbagai macam organisasi kemanusiaan telah meningkat pesat, dan tugas kemanusiaan telah dilembagakan dalam Islamic Cooperation Humanitarian Affairs Department (ICHAD) yang

¹⁰³ Pekka Hakala and Andreas Kettis. *the Organization of Islamic Cooperation: Defined – for better and Worse – by its religious dimension*. Policy Department, Directorate-General for External Policies. This Policy Briefing was requested by the European Parliament's Committee on Foreign Affairs. 2013

didirikan pada 2008. Baik ICHAD dan program aksi sepuluh tahun OKI, keduanya memprioritaskan rencana organisasi untuk memperkuat keterlibatannya dalam isu kemanusiaan.¹⁰⁴ OKI juga membentuk komisi HAM sebagai langkah penting dalam mengimplementasikan deklarasi mengenai HAM tersebut. Sesi pertama dari Komisi HAM permanen diadakan di Jakarta pada Februari 2012.

Piagam tersebut menyatakan bahwa Komisi akan memajukan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di negara-negara anggota serta hak-hak fundamental minoritas muslim dan masyarakat di negara-negara non-anggota sesuai dengan norma dan standar HAM yang diakui secara universal dan dengan tambahan nilai prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan berdasarkan syariah.

Sebagai langkah lanjutan dalam upaya penegakan HAM, OKI telah menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Menteri di kantor OKI yang terletak di Istana Yildiz, Istanbul pada 15 Juli 2011. Pertemuan ini ditujukan untuk membahas masalah pelaksanaan Resolusi 16/18 Dewan HAM PBB tentang "Memerangi ketidaktoleranan, negatif stereotip dan stigmatisasi, dan diskriminasi, hasutan terhadap kekerasan, dan kekerasan terhadap orang-orang berdasarkan agama atau kepercayaan".

Pertemuan tersebut menegaskan kembali komitmen para peserta

¹⁰⁴ Bozorgmehri Majid. *The Human Rights in OIC, A gradually Movement but in Progress*. Journal of Politics and Law; vol. 10, no. 2; 2017. Canadian Center of Science and Education. Hlm. 75.

terhadap pelaksanaan langkah-langkah yang efektif yang ditetapkan dalam Resolusi 16/18 PBB. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal OKI Ekmeleddin Ihsanoglu dan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton. Menteri Luar Negeri dan pejabat tinggi di 28 negara dari negara-negara anggota OKI dan negara-negara barat, termasuk organisasi internasional serta Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri, Catherin Ashton, diundang untuk berpartisipasi.

Dalam pernyataannya, Clinton mengatakan bahwa pertemuan dan komitmen bersama yang diwakilinya, sangat penting. dia menyatakan bahwa pertemuan tersebut ialah salah satu peristiwa yang memiliki konsekuensi besar. Dia memuji OKI karena telah membantu memberikan Resolusi 16/18 di Dewan Hak Asasi Manusia.

"Bersama-sama kita telah mulai mengatasi perpecahan palsu yang menimbulkan kepekaan religius terhadap kebebasan berekspresi, dan kita sedang mengejar sebuah pendekatan baru berdasarkan langkah konkret untuk melawan intoleransi dimanapun terjadi. Dengan resolusi ini, masyarakat internasional mengambil sikap yang kuat untuk kebebasan berekspresi dan beribadah, dan melawan diskriminasi juga kekerasan berdasarkan agama atau kepercayaan," kata Clinton.¹⁰⁵

¹⁰⁵ *New Name and Emblem for OIC in Astana Organization of Islamic Cooperation.* OIC journal, issued by The Organization of Islamic Cooperation. Issue No 18. June August 2018. Jeddah, Saudi Arabia

Selanjutnya, Duta Besar Eileen Chamberlain Donahoe, Perwakilan AS untuk Dewan Hak Asasi Manusia, mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan sinyal penting bahwa masyarakat internasional dapat menemukan dasar yang sama untuk menangani sebuah isu yang tampaknya tidak dapat diatasi selama lebih dari satu dekade dan menemukan cara untuk mendukung kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi, pada saat bersamaan menjalin persatuan dalam memerangi intoleransi agama.

Pertemuan tersebut telah menggambarkan bagaimana HAM bukanlah suatu hal yang hanya diperjuangkan oleh satu badan atau satu organisasi. Semakin banyak pihak yang terlibat demi mewujudkan nilai-nilai HAM yang berlaku bagi setiap manusia. Hak asasi terus diperjuangkan agar nilai demokrasi dapat tercapai dan kebebasan yang meliputi kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan beragama, serta kebebasan lainnya, dapat diraih setiap manusia, tak terkecuali muslim.

Kebebasan beragama bagi para muslim kemudian menjadi tantangan baru bagi OKI. Dapat dikatakan bahwa muslim yang menjadi kaum mayoritas di suatu negara, atau muslim yang tinggal di negara Islam, memiliki nasib yang terjamin dalam berkeyakinan. Namun beda halnya dengan muslim yang tinggal di negara nonmuslim dan menjadi kaum minoritas. Dengan banyaknya tragedi serangan teror yang mengatasnamakan Islam, HAM dan kebebasan untuk menjalankan ajaran

agamanya kemudian menjadi hal yang sukar digapai oleh mereka. Pada hakikatnya OKI terbentuk untuk menegakkan nilai HAM bagi seluruh muslim di penjuru dunia, tanpa pengecualian. Inilah tantangan bagi OKI yang mengaku sebagai suara muslim dunia, untuk memperlihatkan dan membuktikan eksistensi serta kapabilitasnya dalam mengupayakan penegakan HAM umat Islam, bahkan di negara minoritas muslim sekalipun.

5.2 Peran OKI Terhadap Islamophobia di Prancis

Peranan OKI dalam Menangani Isu Islamophobia di Prancis sebagai inisiator, sebagai mediator, dan juga sebagai fasilitator demi terselesainya atau mengurangi isu Islamophobia di Prancis.¹⁰⁶ Adapun penjabaran dari peranan-peranan OKI dalam menangani isu Islamophobia di Prancis, yaitu:

5.2.1 OKI sebagai Inisiator

Adanya isu Islamophobia di Prancis, OKI sendiri berperan sebagai inisiator. Ketika OKI telah mendapatkan laporan bahwasanya terdapat diskriminasi dan aturan yang merugikan bagi kaum Muslim di Prancis, OKI langsung ambil tindakan gerak cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. OKI meminta semua anggotanya dan juga masyarakat internasional untuk mendesak pemerintah Prancis bersikap adil terhadap

¹⁰⁶ Reuters. (2013, Juni 30). *OIC Helps Islamophobia Issue in France*. Retrieved from reuters.com:https://www.reuters.com/article/us-oic-france-idUSBRE95T07F20130630

kaum Muslim Prancis. OKI melakukan hal seperti ini juga demi kesejahteraan kaum Muslim Prancis dan agar tidak terjadinya hal-hal yang mengganggu hubungan antara OKI dan juga Uni Eropa terlebih Prancis.

5.2.2 OKI sebagai Mediator

Adanya isu Islamophobia di Prancis, OKI sendiri selain berperan sebagai inisiator, OKI juga berperan sebagai mediator. Tepatnya pada tanggal 7 Januari 2015, dimana terjadinya serangan teror di kantor majalah satir Charlie Hebdo, pemimpin OKI langsung mengatakan belasungkawa atas banyaknya korban yang berjatuhan dan mengenai serangan serta isu islamophobia, OKI siap akan membantu memulihkan nama baik warga Muslim Prancis yang sudah tercemar dengan ditambah serangan teror yang mengatasnamakan Muslim tersebut.

Lalu, tidak lama setelah serangan teror tersebut, OKI langsung mengirimkan beberapa delegasinya untuk bertolak ke Paris, Prancis guna mengecek dan membantu warga imigran Muslim di Prancis. Tepat di hari setelahnya, yaitu di tanggal 10 Januari 2015, Iyad bin Amin Madani selaku Sekjen OKI pada saat itu langsung mengajak beberapa delegasinya untuk bertolak kembali ke Prancis untuk bertemu dan berdiskusi dengan beberapa pejabat Prancis, PBB, dan petinggi-petinggi negara Uni Eropa. OKI juga memberikan kesempatan dan siap menunggu untuk menjelaskan hingga detail kasus-kasus Islamophobia ini.

Delegasi OKI tersebut selain bertemu dengan beberapa pejabat Prancis,

PBB, dan petinggi-petinggi Uni Eropa, mereka juga bertemu dengan beberapa tokoh dan masyarakat Muslim di Prancis untuk membantu meringankan masalah diskriminasi sosial serta keyakinan tersebut agar masyarakat Muslim di Prancis merasa adil.¹⁰⁷

5.2.3 OKI sebagai Fasilitator

OKI di sini selain mengambil peranan penting seperti inisiator dan mediator, OKI juga mengambil peranan penting sebagai fasilitator, dimana OKI siap memberikan fasilitas bantuan terhadap korban serangan Charlie Hebdo dan para kaum Muslim Prancis yang terkena imbas diskriminasi ini oleh kaum-kaum fanatisme Prancis. OKI mengajak kembali para delegasinya beserta Presiden Bulan Sabit Merah Qatar pada saat itu, dan Yayasan Amal Internasional.

OKI langsung bertemu dengan beberapa pejabat politik Prancis dan membahas bantuan yang akan diberikan OKI kepada mereka. Akhirnya Pemerintah Prancis setuju untuk menerima bantuan OKI. OKI memberikan beberapa alat kesehatan untuk para korban teror Prancis dan beberapa dokter kejiwaan untuk memulihkan korban yang terkena dampak diskriminasi parah oleh para kaum fanatisme Prancis.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Agriesta, D. (2015, September 5). *medcom.id*. Retrieved from *OKI akan Bawa Isu Islamophobia Perancis ke Forum PBB dan Uni Eropa* : <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/zNAjPJeb-oki-akan-bawa-isu-islamophobia-perancis-ke-forum-pbb-dan-uni-eropa>

¹⁰⁸ VOA. (2015, Januari 16). *voaindonesia.com*. Retrieved from *OKI Menyalurkan Bantuan kepada Korban Teror Perancis*: voaindonesia.com/peristiwa/zMPjpnJleb-oki-menyalurkan-bantuan-kepada-korban-teror-perancis

5.2.4 IPHRC (Independent Permanent Human Right Commission)

OKI juga membentuk sebuah badan ahli yang berdiri secara sah dan mandiri yang berfokus pada kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM), namun lebih ke kejahatan HAM Muslim. IPHRC sendiri dibentuk pada tahun 2008, dimana dibentuk jauh sebelum teror terjadi di Prancis. Oleh karena hal tersebut OKI membentuk IPHRC juga di Prancis.¹⁰⁹

5.2.5 Upaya Organisasi Kerjasama Islam dalam menangani Islamophobia di Prancis

Munculnya masalah yang dihadapi para Muslim di Eropa, Organisasi Internasional OKI (Organisasi Kerjasama Islam) hadir untuk merespon masalah ini. Organisasi Kerjasama Islam merupakan organisasi yang di dalamnya terdapat 57 negara anggota dan negara-negara tersebut kebanyakan terdapat mayoritas muslim. OKI sendiri muncul karena dilatarbelakangi oleh masalah-masalah yang muncul terhadap kaum Muslim. Adanya kehadiran Organisasi inilah sebagai bentuk tanggung jawab yang diemban saat melihat ketidakadilan terjadi kepada para umat Muslim di Eropa. Di tahun 2010, OKI mencari kekuatan serta sumber dukungan baru yaitu dengan para Komunitas Internasional untuk mendukung masalah-masalah fenomena Islamophobia.

¹⁰⁹ OIC. (2015, Mei 16). Retrieved from oic-oci.org: http://www.oic-oci.org/page_detail.asp?p_id=52

Terdapat forum yang telah diselenggarakan oleh Aliansi Peradaban di Rio De Janeiro, Brasil di bulan Mei 2010, dan merupakan forum Internasional pertama OKI atau Organisasi Kerjasama Islam dibuat untuk mendiskusikan adanya permasalahan-permasalahan tentang Islamophobia. OKI juga telah kembali untuk mengangkat isu-isu tentang perlawanan pada tindakan Islamophobia di sebuah konferensi toleransi beragama, yang diadakan di Astana, Kazakhstan pada tahun 2010. Lalu masih pada saat tahun 2010 di Jenewa, Swiss tepatnya dalam Sesi ke lima belas Dewan HAM, adanya presentasi yang telah dilakukan oleh Sekretaris Jenderal OKI yang berisikan delapan visi mengenai adanya pendekatan konsensus yang bertujuan untuk mempromosikan budaya-budaya tentang pentingnya toleransi dan pentingnya rasa saling mengerti.¹¹⁰

Selain membentuk forum-forum serta konferensi-konferensi tingkat Internasional, OKI (Organisasi Kerjasama Islam) juga melakukan banyak upaya yang menjadi tolak-ukur peran mereka sebagai organisasi Islam dalam menangani kasus Muslim yang terjadi di belahan dunia Eropa. Beberapa upaya yang dilakukan oleh OKI ini dijabarkan seperti yang dibawah ini:

a) Melakukan tindakan peningkatan dalam kampanye yang berguna untuk

¹¹⁰ Kemlu. (2014). [*Organisasi Kerjasama Islam \(OKI\)*](#).

menciptakan dan mengembangkan kesadaran masyarakat terkait bahayanya Islamophobia. Selain itu juga mempromosikan citra positif untuk Muslim terutama di sebar di daerah-daerah yang memiliki tingkat tinggi terjadinya Islamophobia.

b) Melaksanakan kunjungan ke berbagai negara-negara Barat serta untuk bertemu dengan komunitas Muslim di sana guna mendengar keluhan-kesah dan rasa keprihatinan mereka.

c) OKI juga melakukan penyebarluasan terhadap laporan mengenai Islamophobia, informasi serta jurnal-jurnal yang terkait mengenai Islamophobia.

d) perlunya peran kantor OKI yang berada di luar negeri untuk maksimal dalam menangani isu Islamophobia di sekitar wilayah dan melakukan kerjasama dengan komunitas muslim lokal terkait Islamophobia.

e) Memberikan dukungan baik kepada lembaga-lembaga OKI, baik itu berupa finansial maupun berupa politis yang sudah relevan dan turut andil dalam melawan adanya Islamophobia.

f) Dapat mengambil keputusan maupun langkah yang tepat untuk melawan tindakan atau hasutan untuk saling membenci, diskriminasi dan melakukan kekerasan yang sudah mengarah aspek keagamaan.

5.2.6 Perang Melawan Terorisme

OKI bertekad untuk terus mengutuk semua tindakan terorisme terlepas dari mana pun tindakan tersebut terjadi dan siapapun yang

melakukannya.¹¹¹ Hal ini sesuai dengan sebuah resolusi yang dikeluarkan OKI mengenai “Perang Melawan Terorisme dan Ekstrimisme” yaitu 55 Resolusi No. 41/44-POL yang merupakan Sidang Dewan Menteri Luar Negeri OKI yang ke-44 (Sesi Pemuda, Perdamaian, serta Pembangunan dalam Solidaritas Dunia), yang di diadakan di Abidjan, Republic of Côte d'Ivoire pada Juli 2017. Resolusi ini mengingatkan kembali pada Kode Etik mengenai perang melawan terorisme internasional yang diadopsi oleh OKI pada 1994, serta mengingatkan Konvensi OKI tentang Memerangi Terorisme yang terbentuk pada Sidang ke-26 Konferensi Islam para Menteri Luar Negeri (Sidang Perdamaian dan Kemitraan untuk Pembangunan) diadakan di Ouagadougou, Burkina Faso, Juli 1999.

Berdasarkan Program Aksi Sepuluh Tahun OKI yang tegas mengancam segala bentuk dan manifestasi terorisme dan tegas menolak pembenaran atau alasan apapun untuk terorisme, sesuai dengan hasil akhir dari Rapat Umum Terbuka Luar Biasa Komite Eksekutif OKI di tingkat menteri yang diadakan di Jeddah pada 15 Februari 2015, mengingat prinsip dan tujuan piagam PBB yang ditujukan demi mempertahankan nilai perdamaian dan keamanan serta mengambil langkah-langkah kolektif dan efektif demi tujuan tersebut, menegaskan kembali kebutuhan untuk mengatasi masalah ekstremisme, dalam hal ini, lahirlah Resolusi Majelis

¹¹¹ *Tenth OIC Observatory Report on Islamophobia* (October 2016 – May 2017). Presented to the 44th Council of Foreign Ministers. Abidjan, Republic of Côte d'Ivoire. Hlm. 95. Diunduh dari <https://www.oic-oci.org/islamophobia>

Umum 53/243 yang berisikan Deklarasi dan Rencana aksi untuk mempromosikan Budaya damai, selaras dengan lahirnya berbagai konsensus , antara lain:¹¹²

- 1.) Mengutuk tindakan teroris di seluruh dunia dan menegaskan kembali Prinsip OKI yang mengecam terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Kemudian menyatakan bahwa terorisme tidak memiliki agama, kebangsaan, atau ras; dan bahwa para pelaku dan mereka yang berada di balik tindakan tersebut merupakan penghinaan terhadap kemanusiaan dan semua nilai moral dan manusia.
- 2.) Mengakui bahwa terorisme tidak dapat diatasi hanya dengan cara keamanan atau militer sendiri, dan menggarisbawahi kebutuhan untuk mempromosikan inisiatif yang bertujuan mencapai perdamaian melalui rekonsiliasi nasional dengan kelompok-kelompok dan individu-individu yang menghindari kekerasan dan ide-ide ekstrimis.
- 3.) Mengundang Sekretaris Jenderal, bekerja sama dengan negara-negara Anggota, untuk mengembangkan pendekatan baru untuk mengatasi akar penyebab fenomena global terorisme, kekerasan dan ekstremisme, dan sarana untuk mengatasinya di politik,

¹¹² *Resolutions on Political Affairs Adopted by The 44th Session of The Council of Foreign Ministers (Session oYouth, Peace And Development in A World of Solidarity)*. Abidjan, Côte D'ivoire. Hlm. 99. Diunduh dari <https://www.oic-oci.org>>docdown

tingkat ekonomi, sosial dan intelektual, dan memperhatikan kompleksitas Fenomena, khususnya keterkaitan erat antara organisasi teroris dalam hal pertukaran senjata, petarung, pembiayaan dan keahlian lapangan, juga sebagai kerangka kerja intelektual dan ideologis yang mereka bagi.

- 4.) Meminta Sekretaris Jenderal untuk berkontribusi pada perdebatan yang sedang berlangsung melawan terorisme, kejahatan lintas batas, dan modalitas untuk mengatasi ekstremis dan wacana sektarian dengan mengadakan konferensi, simposium dan lokakarya serta kerjasama dengan Negara-negara Anggota OKI dan berbagai lembaga dan mitranya, dengan partisipasi para pemimpin politik, agama dan tradisional, psikolog dan sosiolog, dll.¹¹³

Aksi terorisme beruntun pada tahun 2015 di Paris merupakan duka besar, bukan hanya bagi Perancis, namun bagi seluruh dunia. OKI terus mengutuk berbagai tindakan terorisme yang terjadi. Sebagaimana OKI melalui Sekretaris jenderal yang menjabat saat itu, Iyad Ameen Madani menyuarkan kecamannya atas serangan teroris yang dilakukan di Ibukota Prancis, Paris, pada Jumat malam 13 November 2015, yang menewaskan ratusan jiwa dan menyebabkan luka bagi banyak orang yang tidak bersalah.

¹¹³ *Ibid*, hal 100-102

Madani menyampaikan belasungkawa tulusnya kepada keluarga para korban serta kepada Pemerintah dan rakyat Perancis dan mengharapkan kesembuhan bagi mereka yang terluka. Dia juga menegaskan kembali solidaritas dan dukungan yang tak tergoyahkan dari OKI kepada Prancis dalam situasi yang kritis tersebut. Madani menyatakan penolakan tegasnya terhadap setiap tindakan teroris yang melanggar hak untuk hidup yang mencoba untuk merusak nilai-nilai universal manusia termasuk nilai-nilai kebebasan dan kesetaraan yang dipromosikan oleh Perancis secara konsisten.¹¹⁴

Dukungan OKI bagi Perancis terus konsisten dilancarkan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai isu-isu pada tahun 2017, OKI telah mengutuk berbagai serangan teroris yang terjadi, seperti serangan yang dilakukan terhadap patroli keamanan di pintu masuk Museum Louvre di Ibukota Prancis, Paris. Sekretaris Jenderal OKI, Dr. Yousef Bin Ahmed Al Othaimen, mengungkapkan kekhawatirannya dan ketidaksetujuan penuh atas kejahatan tersebut, yang menurut investigasi pemerintah Perancis, adalah jejak dari sebuah aksi teroris.

OKI melalui pernyataan Sekretaris Jenderalya juga mengecam keras serangan yang menimpa Polisi Prancis di Avenue Champs Elysée di Paris pada Kamis, 20 April 2017. OKI menegaskan kembali bahwa para pelaku

¹¹⁴ *OIC Secretary General Strongly Condemns the terrorist attacks in Paris* (14/11/2015). Diunduh dari <https://www.oic-oci.org>

bukan hanya musuh bagi umat manusia, namun juga musuh bagi seluruh nilai moral serta prinsip-prinsip agama. Kemudian OKI juga mengecam keras serangan mobil yang ditujukan pada sekelompok tentara di pinggiran kota Paris pada Rabu, 9 Agustus 2017. Sekretaris Jenderal Dr. Yousef A. Al-Othaimen menyatakan solidaritas OKI akan selalu mengalir untuk pemerintah Perancis dan rakyatnya dalam menghadapi aksi teroris yang menargetkan keamanan negara.¹¹⁵

5.2.7 Mengadakan Interfaith Dialogue

Dialog antaragama atau dialog antarbudaya dikatakan penting dikarenakan dialog tersebut adalah esensi dari memperjuangkan nilai-nilai pluralisme budaya, dengan memprioritaskan rasa saling peduli, dan saling menghormati antar satu sama lain. Dialog menjadi peran utama OKI dalam mewujudkan visi-misinya sebagai upaya melawan diskriminasi dan ekstermisme demi terciptanya toleransi dan perdamaian. Agar suatu dialog mampu mencapai tujuan tersebut, maka dialog tersebut harus terorganisir untuk mampu berpengaruh sampai ke akar masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa rentetan serangan yang terjadi di Perancis dalam kurun waktu satu tahun merupakan duka besar bagi negara. Setelah serangan Charlie Hebdo pada Januari 2015, kemudian dilanjutkan dengan tragedi 13 November, muslim menjadi objek utama masyarakat untuk dijadikan tersangka. Hal ini menimbulkan tindakan-tindakan

¹¹⁵ *OIC Strongly Condemns Car Attack on Soldiers in Paris* (11/08/2017). Diunduh dari <https://www.oic-oci.org>

rasisme yang tidak jarang berujung kekerasan. Akhirnya fenomena tindak islamophobia menjadi hal yang tidak terelakkan. Maka dari itu, OKI bertekad untuk menunjukkan upayanya dalam mengatasi tindakan islamophobia tersebut. Hal ini sesuai dengan seruan dari Sekretaris Jenderal OKI, Dr. Yousef bin Ahmed Al-Othaimeen untuk meningkatkan kesadaran global akan bahaya manifestasi yang semakin meningkat dari Islamophobia dengan mengutamakan prinsip-prinsip perdamaian, harmoni dan keamanan di antara semua masyarakat. Baginya hal ini dapat terwujud dengan pembentukan budaya dialog, saling menghormati, dan saling pengertian. Hal ini sesuai dengan sebuah pernyataan yang disampaikan di Forum Dunia Keempat tentang Dialog Antarbudaya, yang diadakan di Baku, ibu kota Azerbaijan pada 5 Mei 2017.¹¹⁶

Forum ini adalah inisiatif dari Presiden Yang Mulia Ilham Aliyev, Republik Azerbaijan, dan diadakan dalam kemitraan dengan UNESCO, Aliansi Peradaban PBB, WTO, FAO, ISESCO dan Dewan Eropa. Sekretaris Jenderal menggarisbawahi komitmen OKI untuk terus mendukung ide-ide inovatif yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan nilai-nilai toleransi antaragama, budaya dan peradaban, sebagai komitmen yang tercantum dalam Program Aksi 10 Tahun OKI 2025. Al-Othaimeen menambahkan bahwa OKI selalu mendorong dialog sebagai cara untuk

¹¹⁶ *The Secretary General Calls for Raising Global Awareness of the Dangers of the Growing Manifestations of Islamophobia.* Diunduh dari <https://www.oic-oci.org>

membawa pandangan yang lebih dekat dalam kerangka menghormati perbedaan dan keragaman. Dengan demikian, adalah tanggung jawab global untuk menyebarkan budaya toleransi, koeksistensi damai dan saling pengertian, dan terus mengembangkan pendekatan baru menuju dialog antar budaya melalui penerimaan dan penghormatan bersama.¹¹⁷

OKI mengakui pentingnya dialog antaragama dan dialog antarbudaya sebagai mekanisme efektif untuk mempromosikan nilai toleransi dan memerangi ekstremisme, serta hasutan kebencian yang didasari agama. Hal ini dikarenakan OKI percaya bahwa pencemaran nama baik Islam dapat menimbulkan ketidakharmonisan sosial yang akan memicu pelanggaran terhadap HAM. Peran OKI ini sesuai dengan Deklarasi Prinsip-Prinsip Toleransi yang dicanangkan oleh UNESCO pada 16 November 1995, yang tercatat pada Resolusi Majelis Umum PBB 66/3, 66/154, 66/167 dan 66/208, yang menegaskan pentingnya mempertahankan keragaman budaya dan upaya memerangi intoleransi, stereotif negatif, stigmatisasi, dan diskriminasi, serta mengingat resolusi 21-PFR / 8 pada 22 Januari 2013 yang menekankan pada perang melawan intoleransi, tindakan islamophobia dan xenophobia.¹¹⁸

Dalam laporan observatori ke-10 mengenai islamophobia, OKI menekankan pentingnya dialog antaragama, sebagaimana yang tercantum

¹¹⁷ *Ibid*

¹¹⁸ *Resolutions on Political Affairs Adopted by The 44th Session of The Council of Foreign Ministers (Session oYouth, Peace And Development in A World of Solidarity)*. Abidjan, Côte D'ivoire (10-11 July 2017). Hlm. 81-85.

dalam poin-poin berikut dimana OKI bertekad untuk konsisten:

1.) Terlibat dalam dialog yang konstruktif dan bermakna dengan Non-Muslim sebagai alat pengembangan mekanisme untuk melawan semua jenis diskriminasi terhadap Muslim.

2.) Menyusun strategi dan meningkatkan dialog (antaragama, antarbudaya, dan antarperadaban).

3.) Meningkatkan peran pemimpin agama dan masyarakat untuk mengekang kecenderungan ekstremisme dengan mempromosikan cita-cita toleransi, moderasi, saling menghormati dan koeksistensi damai.

4.) Mendorong dialog antaragama dalam Negara Anggota OKI dan untuk meningkatkan kesadaran tentang interpretasi dan keyakinan agama, dan ruang terbuka untuk diskusi lebih lanjut tentang Islam dan iman.

5.) Bekerja sama dengan para pemangku kepentingan yang peduli, khususnya di benua Eropa dengan pandangan untuk mengubah hati dan pikiran orang barat-nonmuslim bahwa para imigran tidak selalu merupakan ancaman terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip masyarakat Eropa.¹¹⁹

OKI menunjukkan komitmennya mendukung upaya internasional untuk mencapai perdamaian dunia. Salah satu dukungan tersebut ialah melalui kehadiran pihak OKI dalam sebuah Konferensi Perdamaian

¹¹⁹ *Tenth OIC Observatory Report on Islamophobia (October 2016 – May 2017)*. Presented to the 44th Council of Foreign Ministers. Abidjan, Republic of Côte d'Ivoire. Hlm. 94.

Internasional yang diadakan di Paris, Perancis pada 14-15 Januari 2017.¹²⁰ Sebulan setelah Konferensi Perdamaian Internasional, OKI kembali menunjukkan komitmennya, yang mana pada suatu event bertajuk World Interfaith Harmony Week, OKI menggandeng PBB untuk bekerja sama mengadakan sebuah dialog antaragama pada 9 Februari 2017 di Palais des Nations, Jenewa. Mitra penyelenggara lainnya adalah Misi Permanen Jordan untuk PBB di Jenewa, Misi Pengamat Permanen Takhta Suci, Pengamat Tetap Malta kepada PBB di Jenewa, dan Asosiasi Kristen PBB. Pelaksanaan dialog ini sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB A / RES / 65/5 yang diadopsi pada 23 November 2010. Hal semacam ini ditujukan untuk mempromosikan nilai-nilai perdamaian, toleransi, serta persatuan antarbangsa yang beragam.¹²¹

5.3 Menjalin Kerjasama dengan PBB

Sejak tahun 1946, Komisi HAM dalam PBB telah menjadikan isu diskriminasi atas dasar ras, jenis kelamin, budaya, agama, bahasa, sebagai agenda utama. Pada 1950, Komisi membentuk subkomisi mengenai Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas yang difungsikan untuk mengatasi pelanggaran berbasis rasial maupun agama. Pada 1960, sub-komite melakukan penelitian mengenai diskriminasi agama, termasuk rekomendasi untuk diadopsi dalam bentuk Deklarasi Internasional.

¹²⁰ *OIC Secretary General Leaves for France to Participate in the International Peace Conference.* Januari 2017.

¹²¹ *OIC Contributes to the Celebration of the World Interfaith Harmony Week.* Februari 2017.

Perdebatan mengenai hal ini terus berlanjut selama bertahun-tahun. Kemudian pada 1962, Majelis Umum mengadopsi dua resolusi. Pertama ialah mempersiapkan draft deklarasi dan rancangan perjanjian mengenai pemberantasan segala bentuk diskriminasi rasial, dan yang kedua ialah mempersiapkan rancangan deklarasi dan rancangan konvensi terhadap segala bentuk intoleransi agama.¹²²

Pada 1965, PBB menerbitkan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, namun ia gagal mengeluarkan konvensi yang sama terhadap tindak diskriminasi atas dasar agama, yang disebabkan oleh perdebatan dan perpecahan tajam antara negara anggota. Merasa tidak puas dengan keputusan tersebut, sejumlah negara muslim terus mengangkat masalah ini. Akhirnya Komite menyerukan resolusi untuk mengeluarkan deklarasi dan konvensi terhadap segala tindak intoleransi dan diskriminasi agama.¹²³

Terdapat dua peran yang dijalankan PBB dalam memberantas terorisme, yang pertama ialah peran normatif melalui penerapan resolusi demi pencegahan, serta hukum atas tindak terorisme. Yang kedua ialah peran koersif, sebuah peran yang lebih tegas dengan adanya sanksi terhadap individu maupun kelompok teroris. Serangan Paris telah menggemparkan dunia, seluruh negara memberikan dukungan terhadap

¹²² *Countering Islamophobia: An Unfinished Business*. Report of the 8th Regular Session of the OIC Independent Permanent Human Rights Commission. Hlm. 55-56.

¹²³ *Ibid*

Perancis untuk bangkit dari efek serangan yang merugikan.¹²⁴

Pasca tragedi serangan Paris, Selaku sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-Moon turut mengutuk serangan teroris yang telah terjadi.¹⁴⁷ Selain Ban Ki-Moon, kecaman lain juga datang dari Karima Bennoune yang merupakan pelapor khusus PBB dalam bidang hak budaya. Ia menyatakan bahwa serangan 13 November merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan karena dengan sengaja telah menargetkan situs seni dan tempat rekreasi dimana banyak masyarakat yang berkunjung. Bennoune juga menekankan ajakan kepada masyarakat untuk bersatu dalam mengungkap dan mencegah penyebaran ideologi radikal yang berpotensi menimbulkan tindak kekerasan dan kekejaman.¹²⁵

Dua kecaman di atas menandakan bahwa PBB semakin gencar melancarkan aksinya untuk melawan pelaku teror, yaitu ISIS, salah satunya dengan mengeluarkan resolusi untuk meningkatkan aksi melawan kelompok militan bersenjata tersebut. Sebuah keputusan yang kemudian dinamakan resolusi 2249 mendesak seluruh negara anggota PBB untuk ikut serta terlibat dan melaksanakan seluruh langkah pasti dalam perlawanan terhadap aksi terorisme. Menanggapi hal tersebut, Presiden Perancis saat itu, Francois Hollande, setuju dan mengatakan bahwa resolusi 2249 akan membantu menggerakkan negara-negara lain untuk

¹²⁴ *The Fight Against Terrorism*. Permanent Mission of France to the UN in New York. (08/02/2018).

¹²⁵ *Paris attacks: "Crime against humanity, crime against culture"* – UN expert on cultural rights. United Nations Human Rights: Office of The High Commissioner. November 2015

turut memerangi segala bentuk tindak terorisme yang dalam kasus serangan Paris ini diklaim telah dilakukan oleh kelompok bersenjata ISIS. Adapun Menteri Luar Negeri Perancis, Laurent Fabius menyarankan kepada seluruh negara untuk mencari solusi dalam pemberantasan terorisme di dunia, salah satunya yaitu dengan melakukan tekanan melalui serangan militer, maupun dengan pencarian solusi politik.¹²⁶

Peran yang diperlihatkan PBB dalam memerangi terorisme juga ditujukan untuk menegaskan bahwa salah satu tujuan dasar PBB yang tercantum dalam Piagam adalah untuk menekankan pelaksanaan dari nilai-nilai HAM serta kebebasan bagi semua orang tanpa membeda-bedakan dengan dasar ras, keyakinan, bahasa, maupun gender. Selain itu, PBB juga bertekad untuk meraih perwujudan segala prinsip dalam Piagam, Deklarasi Universal HAM, Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, serta Deklarasi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Keyakinan. PBB juga meyakini bahwa terlaksananya nilai-nilai HAM bagi setiap manusia, akan menciptakan stabilitas sosial politik negara. Atas dasar berbagai hal inilah, OKI meyakini bahwa PBB dapat dijadikan partner untuk mengambil peran penting atas terciptanya perdamaian bagi seluruh elemen masyarakat.¹²⁷

¹²⁶ Unggul Tri Ratomo. *Teror Paris - PBB setuju segala cara untuk lawan ISIS*. Sabtu, 21 November 2015

¹²⁷ *Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities*. Adopted by General Assembly resolution 47/135 of 18 December

Hubungan antara OKI dan PBB terjalin dengan erat, mengingat semakin besar dan banyak tantangan global yang menjadikan kerjasama di antara keduanya tak terelakkan. Dalam suatu pertemuan antara pihak OKI dan PBB pada 17 November 2016, delegasi OKI yang diwakili oleh Asisten Sekjen OKI untuk urusan politik, Hameed Opeleyeru, mengungkapkan bahwa tujuan dasar OKI dan PBB secara umum memiliki kesamaan. Kedua organisasi tersebut sama-sama ditujukan untuk perdamaian dunia, keamanan, serta pembangunan internasional. PBB adalah mitra potensial bagi OKI dalam melawan terorisme dan ekstremisme. Untuk memaksimalkan kerjasama antara OKI dan PBB dalam mengatasi ekstremisme dan intoleransi, OKI melakukan hal-hal berikut:

1. Menjaga masalah Islamophobia sebagai perhatian internasional dan dengan demikian tetap menjadi agenda Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Majelis Umum;
2. Memanfaatkan deklarasi Hak Asasi Manusia Jenewa dan PBB sebagai dasar dan kerangka inti untuk mengatasi masalah Islamophobia;
3. Menggunakan perjanjian PBB yang ada seperti kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, larangan diskriminasi rasial, dll, Sebagai alat untuk memerangi Islamophobia;
4. Memastikan kemajuan pada konsensus internasional yang ada

1992. United Nations Human Right Office of The High Commissioner

dalam bentuk Rencana Aksi Resolusi 16/18 Dewan HAM PBB.¹²⁸

PBB kini dikepalai oleh pemimpin baru, seorang sosialis Portugis, Antonio Guterres, yang secara pribadi menggelorakan kampanye antiislamophobia. Sebelum ia menjabat sebagai sekretaris Jenderal pada Januari 2017, Guterres berkunjung ke Saudi Arabia. Dalam suatu pertemuan dengan bangsawan Saudi, ia menyatakan bahwa islamophobia lah alasan dari meningkatnya terorisme di berbagai belahan dunia. Guterres menganggap bahwa maraknya fenomena islamophobia di berbagai penjuru dunia justru telah dijadikan alat oleh kelompok militan seperti ISIS untuk merekrut anggota baru.¹²⁹ Pandangan positif Guterres terhadap Islam tentu merupakan tren positif bagi OKI dalam kemitraannya dengan PBB demi memperjuangkan perdamaian dunia.

5.4. Menjalinkan Kerjasama dengan Uni Eropa

Jauh sebelum tragedi serangan Paris, pada 25 Juni 2013, OKI telah memutuskan untuk menjalin kemitraan dengan mendirikan Misi Pengamat Permanen dengan Uni Eropa (UE), yang berlokasi di Brussels, Belgia.¹³⁰ Pembentukan Misi Pengamat ini bukanlah tanpa suatu alasan. Dengan angka tindakan islamophobia yang tinggi di daratan Eropa, OKI berupaya untuk menjalin hubungan lebih erat dengan Eropa, terutama yang

¹²⁸ *Tenth OIC Observatory Report on Islamophobia* (October 2016 – May 2017). Presented to the 44th Council of Foreign Ministers. Abidjan, Republic of Côte d'Ivoire. Hlm. 95

¹²⁹ Leo Lohmann. *U.N. Leader Blames 'Islamophobia' for Rising Global Terror. 'It's your fault that they're killing you'*

¹³⁰ Soeren Kern. *OIC Opens Office in Brussels to Fight "Islamophobia" in Europe*. 26 Juni 2013. Gagestone Institute: international policy council

menyangkut masalah HAM. Maka untuk mengupayakan hal tersebut, OKI aktif terlibat dalam diskusi dengan lembaga-lembaga UE, seperti Dewan Eropa, Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), untuk membicarakan dan mengusahakan agar segala aspek mengenai tindakan islamophobia dijadikan sebagai pelanggaran standar HAM internasional.

Maka terbentuknya Misi Pengamat Permanen ke UE diharapkan menjadi jembatan bagi OKI untuk menelaah perihal HAM di Eropa. Penilaian akan keberhasilan misi OKI ke UE dapat diukur secara jangka panjang. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dengan penurunan angka tindakan islamophobia di Eropa. Misi permanen ini dianggap sebagai peluang OKI untuk masuk dan memberi pengaruh hukum dan praktik HAM agar diaplikasikan sesuai dengan standar internasional, tanpa merugikan pihak manapun, khususnya pihak minoritas.¹³¹

OKI menjadikan UE sebagai alat diplomasi demi mencapai kepentingannya, menciptakan perdamaian melalui penerapan nilai-nilai HAM bagi seluruh manusia. Sebagai organisasi internasional yang menjalankan perannya dengan mendirikan misi permanen di UE, OKI berharap dapat menerima laporan-laporan mengenai fenomena tindak islamophobia yang terjadi di Eropa secara konstan, untuk kemudian

¹³¹ Elizabeth H. Prodromou. *OIC Opens Permanent Observer Mission to The EU: Assessment And Implications For OIC Agenda on Human Rights*. September 2013. Center for European Studies at Harvard University.

dijadikan bahan acuan bagi OKI dalam menciptakan strategi untuk meredam atau meminimalisir islamophobia.¹³²

Setidaknya sejak 2014, OKI dan UE menjalin hubungan yang lebih serius. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya Pertemuan Konsultasi Tingkat Tinggi OIC-EU pertama yang berlangsung di Brussels pada 8 sampai 9 September 2014 di gedung Uni Eropa. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan landasan bersama demi kemitraan di berbagai bidang yang melibatkan kedua organisasi. Agenda-agenda pertemuan meliputi: membangun dialog antara dunia Muslim dan UE, melindungi minoritas Muslim, kontra-terorisme, keamanan, media, radikalisme, Islamophobia, imigrasi, dan tantangan lain yang mungkin dihadapi kedua organisasi di masa depan.

Delegasi OKI, yang terdiri dari perwakilan berbagai departemen serta Kepala Misi Permanen OKI ke UE, Amb. Arif Mammadov, bertemu dengan pejabat tinggi UE dari European External Action Service (EEAS) dan departemen European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO). Telah digarisbawahi bahwa hubungan OKI-UE tidak boleh dibatasi hanya pada kerjasama politik dan ekonomi, tetapi juga harus mencakup dialog antar-budaya dan antar-agama.¹³³

Hingga tahun 2017, OKI semakin mempererat hubungannya dengan

¹³² *Ibid*

¹³³ *OIC and EU agree to settle a common ground for partnership in different areas.* (16/09/2014) diunduh dari <https://www.oic-oci.org>

UE. Hal ini dibuktikan dengan kelanjutan pembicaraan antara OKI dan UE mengenai penguatan kolaborasi atas kepentingan bersama antara kedua belah pihak. Sekretaris Jenderal OKI, Dr. Yousef Al-Othaimeen melakukan kunjungan ke kantor UE di Brussels dengan menemui Perwakilan Tinggi UE untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Federica Mogherini, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Urusan Luar Negeri dan Politisi Belgia, Didier Reynders, dan Sekretaris Jenderal African, Caribbean, and Pacific Group (ACP), Patrick I Gomes.

Kunjungan selama dua hari ini dimaksudkan untuk mengeratkan kerjasama baik pada tingkat bilateral maupun multilateral. Kerjasama bilateral yang terjalin antara OKI-UE, menegaskan peran OKI dalam mempromosikan toleransi, koeksistensi damai, menghormati minoritas dan keragaman, melibatkan Komunitas Muslim di Eropa dalam menghadapi ancaman radikalisme dan ekstremisme.¹³⁴

Masih di tahun yang sama, sebuah pertemuan kembali digelar. Pertemuan yang diadakan pada 1 Juni 2017 ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal OKI, Dr. Yousef A. Al-Othaimeen, sedangkan dari pihak UE diwakili oleh H.E. Amb Michele Cervone. Kedua belah pihak meninjau hasil pertemuan yang telah diadakan di Brussels dan kedua pihak menyetujui perlunya mengembangkan modalitas untuk bergerak maju ke

¹³⁴ *OIC Secretary General Visits European Union, Meets High Officials (15/02/2017)* diunduh dari <https://www.oic-oci.org>

tindakan nyata pada kesepakatan yang telah disetujui.¹³⁵

Fenomena tindakan islamophobia yang meningkat drastis pasca serangan Paris, telah membuat OKI mengambil tindakan dengan memulai pertemuan reguler Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) dengan tajuk "Freedom of expression Kerjasama antara OKI dan UE juga ditandai dengan diadakannya pertemuan Perwakilan Tinggi UE, Federica Speech." Mogherini, dengan Sekretaris Jenderal OKI, Yusuf bin Ahmad Al-Othaimen. Pertemuan tersebut membahas tentang pentingnya pelaksanaan dialog untuk mengatasi berbagai masalah bersama. Mereka juga menyampaikan tekad untuk merangkul komunitas muslim di Eropa untuk meningkatkan partisipasi pemuda muslim dalam sistem sosial politik di Eropa dan untuk mengajak para pemuda tersebut agar turut mencegah peningkatan radikalisme dan terorisme.¹³⁶

Peningkatan tindakan diskriminasi dan kekerasan yang banyak menargetkan populasi muslim di Eropa, membuat perwakilan OKI bersama UE, Kanada, dan AS, kembali berkumpul dalam suatu forum tingkat tinggi mengenai pemberantasan diskriminasi terhadap muslim. Forum tersebut diadakan pada 17 Januari di markas besar PBB di New York. Tujuan utama dilaksanakannya forum ini adalah untuk mempromosikan keberagaman dan perbedaan sebagai kekayaan, bukan

¹³⁵ *OIC Secretary General Receives the Representative of the European Union to OIC.*

¹³⁶ *EU-OIC toward a closer partnership.* European union external action.

ancaman. Selain itu, forum ini menegaskan perlawanan terhadap segala bentuk diskriminasi. Kesepakatan yang tercipta dari forum ialah mendorong lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah untuk bersama berperan mencegah segala bentuk kekerasan dan kebencian berdasarkan keyakinan.¹³⁷

5.5 Menjalin Kerjasama dengan Media

Media, baik itu media elektronik maupun media cetak, berperan secara langsung atas viralnya berbagai isu yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Menoleh kepada serangan-serangan di Paris, tagar #PrayForParis atau #stopTerrorism menjadi trending topic dalam jangka waktu yang lama. Tidak dapat dipungkiri bahwa tagar tersebut telah menyatukan solidaritas dan kepedulian manusia dari seluruh dunia yang bahkan tidak saling mengenal satu sama lain, untuk mendoakan Paris dan mengutuk terorisme. Melihat media dengan kelihaiannya yang mampu membentuk, memantapkan, maupun merubah perspektif, ide, dan gagasan masyarakat akan berbagai isu yang terjadi, maka diperlukan kesadaran para pengguna media untuk bersikap secara bijak dan tepat.

Penggunaan media secara tidak bijak akan menciptakan dampak yang besar. Opini yang dituangkan dalam media secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi mindset para pembaca. Jika media menjabarkan berita-berita yang positif, pembaca pun akan merespon

¹³⁷ *High Level Forum on Anti-Muslim Discrimination and Hatred. European union external action. Januari 2017*

secara baik. Namun jika yang dijabarkan dalam media adalah berita negatif dan provokatif, maka para pembaca akan hanyut terbawa emosi dalam narasi berita.

Eksistensi media pasca tragedi serangan Paris begitu massive. Namun sayangnya banyak dari dukungan melalui media oleh berbagai pihak kepada Perancis justru menciptakan tuduhan kepada kelompok lain, dalam hal ini ialah minoritas muslim yang dijadikan tersangka utama atas tragedi yang terjadi. Tuduhan tersebut kemudian menimbulkan gelombang rasisme yang tidak dapat dihindari. Media dijadikan alat untuk menyebarkan narasi-narasi diskriminatif yang pada akhirnya membuat citra Islam semakin tercemar. Islam dan muslim semakin dibenci, sehingga tindakan islamophobia menjadi sebuah fenomena yang tidak dapat terelakkan. Maka dari itu, tindakan islamophobia kini dianggap sebagai ancaman terbesar bagi keberlangsungan perdamaian dunia.

Tindak kejahatan Islamophobia sering kali terjadi dikarenakan dari ketidaktahuan mengenai Islam dan muslim. Maka semakin tinggi desakan kepada komunitas internasional untuk berupaya memberantas kampanye-kampanye yang berisikan fitnah mengenai Islam, kemudian mengambil tindakan konkrit untuk memerangi tindak islamophobia. Atas dasar keresahan ini, OKI muncul sebagai organisasi internasional yang bertekad untuk melawan tindak islamophobia dalam segala aspeknya. Dan sebagai badan yang memprioritaskan hak muslim di seluruh dunia, OKI turut

memainkan perannya dalam imbauan penggunaan media secara tepat.

Dalam suatu Sidang Umum PBB dan juga dalam pertemuan antara para pemimpin negara-negara anggota OKI dengan negara barat, OKI menegaskan bahaya dari tindakan islamophobia. Kemudian OKI mengimbau kepada pemerintah dan masyarakat sipil untuk menyebarluaskan pesan toleransi bahkan sampai ke akar-akar masyarakat. Dengan upaya tersebut diharapkan umat manusia mampu menciptakan persatuan yang memungkinkan generasi masa depan hidup dengan saling rangkul antarsesama.¹³⁸

Upaya OKI mengenai penggunaan media semakin dibuktikan dengan berbagai pertemuan yang OKI adakan. Pada 24 Oktober 2016, OKI mengadakan pertemuan di markas besar Sekretariat Jenderal OKI di Jeddah yang membahas strategi media OKI dan cara-cara untuk melawan tindakan islamophobia mengingat maraknya terjadi pidato-pidato kebencian pasca aksi teror di Perancis. Pertemuan ini bertujuan untuk menghasilkan mekanisme yang jelas dan praktis untuk kampanye media anti-islamophobia. Selain itu, pertemuan ini juga bertujuan untuk menghentikan kampanye pencemaran nama baik Islam.¹³⁹

Pertemuan lain yang diadakan ialah persiapan Konferensi Para Menteri Informasi Islam ke 11 di Negara-negara Anggota OKI yang

¹³⁸ Sarah. *Challenges of Countering Islamophobia*. OIC Initiative. Extract from "The Journal" Issued by the Organization of the Islamic Conference (OIC)

¹³⁹ *OIC Holds a Meeting on Mechanisms to Counter Islamophobia through Media* (22/10/2016)

diselenggarakan oleh Kerajaan Arab Saudi pada Desember 2016. perwakilan dari Sekretaris Jenderal OKI, M. Aqeel, mengatakan bahwa sesi ini membahas 11 rancangan resolusi penting dalam melawan tindakan Islamophobia dan sarana untuk meningkatkan kehadiran media OKI.¹⁴⁰

Kemenangan Emmanuel Macron sebagai Presiden Perancis pada Mei 2017 dianggap sebagai kemenangan semangat persaudaraan republikan. Muslim Perancis memiliki harapan tinggi untuk dihapuskannya segala bentuk pidato kebencian. Kemenangan Macron juga menguatkan tekad kelompok mahasiswa muslim untuk melawan radikalisisasi. Aktivisme media dianggap sebagai sebuah upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Anggota organisasi mahasiswa Etudiants Musulmans de France yakin bahwa kehadiran media yang menyampaikan pesan persatuan dan solidaritas, akan mampu menandingi pesan-pesan provokatif yang berisi fitnah terhadap Islam dan muslim. Para aktivis berusaha untuk melawan pengaruh ekstremis dengan memanfaatkan kecanggihan media sosial dengan harapan mengambil empati anak muda. Video pendidikan yang berisikan pendekatan mengenai citra Islam semakin gencar dibagikan dalam channel-channel YouTube dan berbagai media sosial lainnya.¹⁴¹

Setidaknya ada dua cara bagaimana seharusnya masyarakat menggunakan media agar tidak terhasut dengan provokasi yang sering kali

¹⁴⁰ *The Preparatory Meetings of the 11th Islamic Conference of Information Ministers kick off in Jeddah*

¹⁴¹ Andrea Bila. *Reversing the Trend: Countering Islamophobic Narratives in France*. Counter islamophobia kit.

berupa fitnah. Pertama ialah dengan membaca segala narasi berita secara kritis, bukan hanya menerima berita begitu saja. Memilah milah apakah berita yang disajikan berupa fakta atau bukan, serta meneliti apakah sumber berita dapat dipercaya atau tidak.

Mengenai sumber berita, OKI dalam menjalankan fungsi organisasi internasional, telah menyediakan berbagai informasi yang semuanya tercantum dalam website resmi OKI, serta website resmi badan-badan di bawah naungan OKI. Dalam website tersebut, OKI menjabarkan informasi-informasi, hasil-hasil survey, yang dapat digunakan pembaca sebagai pembandingan dengan berita-berita lain. Kedua, Seluruh muslim diharapkan ikut serta menyebarkan kontra berita-berita provokatif. Umat muslim diimbau untuk menyebarluaskan citra positif mengenai Islam melalui semua aplikasi media sosial yang banyak digunakan kalangan anak-anak, remaja, sampai orang dewasa.¹⁴²

5.6 Analisa Tantangan dan Peluang

Berbicara perihal tantangan dan peluang dalam upaya mengatasi fenomena islamophobia di suatu negara, tentu tidak akan lepas dari pembahasan tentang kebijakan pemerintah yang memimpin. Dalam skripsi ini, penulis mengambil periode dari tahun 2015 sampai 2017, yang berarti ada dua pemimpin yang menjabat dalam kurun waktu tersebut. Kebijakan keduanya tentu akan berpengaruh dalam upaya OKI, apakah akan menjadi

¹⁴² Afia Ahmed Chaudry. *How Do the Media fuel Islamophobia?* (14 mei 2016)

sebuah peluang atau justru menjadi sebuah tantangan.

Tragedi pada awal dan akhir tahun 2015 itu terjadi saat Perancis di bawah kepemimpinan Francois Hollande. Hollande sejak saat itu mulai gencar memerangi terorisme, salah satunya dengan cara meniadakan imam-imam yang dianggap menyebarkan ajaran ekstremis dan Islam radikal. Selain itu, Hollande juga menyerukan pembentukan “Islam Perancis,” sebuah ajaran mengenai sekularisme yang sesuai dengan nilai-nilai di Perancis.

Tekad Francois Hollande untuk mencegah penyebaran ekstremisme di Perancis juga terlihat dari anggapannya bahwa Islam radikal telah menjadi sebuah negara palsu yang dipimpin oleh para pembunuh yang menyebarkan kebencian. Anggapan Hollande tersebut berlandaskan kekhawatiran atas data yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri perancis bahwa lebih dari 2.100 warga Perancis terlibat dalam jihad radikal, dengan lebih dari 200 warganya telah pulang dan tersebar di berbagai penjuru Perancis.¹⁴³

Ketidakberpihakan Hollande terhadap Islam ditandai dengan pernyataannya bahwa Perancis memiliki “masalah dengan Islam” terutama dengan meningkatnya angka imigran gelap yang menetap di Perancis. Bahkan ia memprediksi bahwa wanita-wanita berjilbab akan menjadi

¹⁴³ Tim Hume and Lauren Said-Moorhouse. *Hollande: Republic must create 'Islam of France' to respond to terror threat*. CNN. Desember 2016

Marianne di masa depan. Marianne sendiri adalah simbol republik Perancis yang melambangkan kebebasan yang berbentuk patung wanita. Menurut Hollande, wanita berjilbab pada awalnya memang menjadikan penutup kepalanya sebagai perlindungan diri, namun lambat laun jilbab tersebut wanita jadikan sebagai simbol agama kemudian memaksakan pengakuan dan eksistensinya di tengah masyarakat. Pernyataan Hollande mengenai masalah dengan Islam didasari oleh anggapannya bahwa Islam adalah agama yang menuntut pengakuan.¹⁴⁴

Peningkatan tindakan islamophobia yang terjadi pasca tragedi serangan Paris, membuat pemerintah ikut serta menangani tindakan yang dianggap telah melakukan kejahatan kebencian yang merugikan, khususnya bagi muslim. Larangan penggunaan burkini oleh beberapa walikota di Perancis dinilai telah merampas kebebasan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama yang diyakininya. Maka pada tanggal 26 Agustus 2015, pengadilan administratif tertinggi di Perancis secara resmi menolak larangan penggunaan burkini. Dalam putusan pengadilan dijelaskan bahwa tidak ada bukti perihal penggunaan burkini yang memicu resiko pelanggaran terhadap perdamaian dan ketertiban umum. Beberapa Walikota, termasuk Walikota Nice, dengan tegas menolak keputusan tersebut dan bertekad untuk menegakkan pelarangan penggunaan burkini

¹⁴⁴ Kim Willsher. *François Hollande: France has 'a problem with Islam'*. The Guardian. Paris. Oktober 2016

di pantai-pantai.¹⁴⁵

Pelarangan penggunaan burkini juga didukung oleh mantan Presiden Nicolas Sarkozy yang saat itu berniat untuk kembali ke istana kepresidenan, yang mencoba mengambil simpati masyarakat dengan menjanjikan larangan nasional terhadap penggunaan burkini. Janji yang dilontarkan oleh Nicolas Sarkozy untuk melarang penggunaan burkini justru memperlihatkan sisi pro Hollande kepada Islam. Hollande menentang janji Sarkozy tersebut. Hollande menganggap Islam dapat hidup berdampingan dengan nilai sekularisme Perancis. Maka dengan semangat toleransi, ia membela minoritas muslim atas isu pelarangan burkini bagi wanita muslim.¹⁴⁶

Pada masa pemerintahan Hollande, telah dibentuk suatu badan bernama The Bordeaux-based Center for Action and Prevention Against Radicalization of Individuals (CAPRI). CAPRI mulai dioperasikan pada akhir 2015 dengan tujuan melakukan pendekatan kepada para pemuda untuk menghindarkan mereka dari ajaran radikal dan mengajak mereka untuk mencegah penyebaran narasi ekstremis serta teori konspirasi. CAPRI sendiri mendapat suntikan dana dari pemerintah pusat dan lokal. CAPRI juga melakukan kerjasama dengan beberapa organisasi Islam lokal

¹⁴⁵ *France 2016 International Religious Freedom Report: executive summary.* International Religious Freedom Report for 2016. United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. Hlm. 10.

¹⁴⁶ Afp and Simon Holmes. *Deeply unpopular Hollande calls for France to 'embrace' Islam and rejects calls for a nationwide burkini ban.* september 2016. www.dailymail.co.uk

seperti the Muslim Federation of the Gironde, and the Regional Councils of the Muslim Religion of Aquitaine and Poitou-Charentes.

Selain membentuk lembaga yang bertujuan mencegah ajaran-ajaran radikal masuk dan berkembang dalam pemikiran para pemuda, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan juga terus menggalakkan ajaran perihal toleransi antarsesama manusia. Kementerian Pendidikan berkerja sama dengan sebuah NGO, International League Against Anti-Semitism and Racism, mendidik guru serta siswa dengan memasukkan lebih banyak isu-isu rasisme dan diskriminasi, serta intoleransi ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Menggalakkan isu-isu tersebut ditujukan untuk mengajarkan siswa sejak dini akan bahaya dari tindakan intoleransi yang dapat mengancam eksistensi perdamaian dunia. Sejak September 2015, kurikulum nasional memberi mandat kepada seluruh sekolah untuk menambah 300 jam bagi setiap murid, sejak SD sampai SMA, untuk membentuk watak yang berdasarkan “pendidikan moral dan kewarganegaraan,” termasuk mendidik siswa untuk memerangi terorisme, rasisme, anti-semitisme, prasangka buruk, dan diskriminasi.¹⁴⁷

Selain menggandeng kementerian pendidikan, pada 8 Desember 2016, pemerintah melalui Kementerian dalam Negeri meluncurkan Yayasan Islam di Perancis. Fokus dari yayasan tersebut ialah mengadakan pelatihan

¹⁴⁷ *France 2016 International Religious Freedom Report: executive summary*. International Religious Freedom Report for 2016. United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. Hlm. 11

kepada para imam, memberikan dukungan untuk pusat kebudayaan Islam, promosi acara dan konferensi yang berkaitan dengan islam, serta menerapkan studi tentang islam sebagai disiplin ilmu di universitas-universitas di Perancis.¹⁴⁸

Adapun peran pemerintah melalui kementerian luar negeri terlihat dari terselenggaranya KTT pada 13 September 2016 yang didukung oleh beberapa NGO Coexister and Human Rights First. KTT tersebut diadakan untuk menciptakan persatuan melawan pidato kebencian, khususnya yang tersebar di media sosial. Tindakan lebih tegas ditunjukkan oleh pemerintah yang mengeluarkan putusan deportasi kepada lebih dari 80 penyebar khutbah kebencian. Bahkan pemerintah secara tegas akan mengeluarkan perintah deportasi tambahan, jika diperlukan.¹⁴⁹

Sebagai upaya untuk mencegah perkembangan rasisme dan intoleransi pasca tragedi serangan Paris, Pemerintah Perancis semakin memperketat UU tentang kejahatan kebencian serta melakukan tindakan tegas atas segala bentuk tindakan rasisme. Pemerintah juga secara tegas meningkatkan hukuman bagi kejahatan yang dipicu oleh aksi rasisme. Bahkan perkataan yang memicu kebencian telah dianggap sebagai suatu tindak pidana. Pemerintah bahkan rela menghabiskan € 100 juta (Rp. 1,73 triliun) yang dipergunakan selama tiga tahun, untuk memerangi rasisme,

¹⁴⁸ *Ibid*, hal 15

¹⁴⁹ *Ibid*, hal 15

baik yang terjadi secara langsung, maupun secara online via media sosial.¹⁵⁰

Kemenangan Emmanuel Macron sebagai pemimpin baru bagi Perancis, nampaknya menjadi angin segar bagi muslim di Perancis di tengah perkembangan partai sayap kanan yang membuat para muslim merasa was-was. Kampanyekampanye Macron sebelum ia terpilih dinilai jauh dari hal-hal berbau rasis dan diskriminatif. Dukungan penuh atas Macron pun diperlihatkan oleh OKI yang mana saat Macron terpilih pada Mei 2017, Sekretaris Jenderal OKI, Dr. Yousef Al-Othaimeen mengirim ucapan selamat atas amanah baru yang diemban oleh Macron. Al-Othaimeen merasa yakin bahwa Perancis di bawah kepemimpinan Macron akan menjadi model bagi tegaknya demokrasi. Ia juga yakin bahwa Macron mampu mengayomi rakyatnya yang terdiri dari beragam suku, etnis, dan agama, dengan menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis.¹⁵¹

Sebelum terpilih menjadi Presiden, Emmanuel Macron mengklaim bahwa warga Perancis telah membuat kesalahan ketika mendiskriminasi muslim secara tidak adil, yang menunjukkan Perancis kurang konsisten sebagai penganut liberal yang mengutamakan kebebasan, termasuk kebebasan beragama. Macron berpendapat bahwa seluruh warga negara

¹⁵⁰ Angelique chrisafis. *France launches major anti-racism and hate speech campaign.* 17 april 2015. The guardian

¹⁵¹ *OIC Secretary General Sends Congratulatory Message to French President-elect Emmanuel Macron.* Mei 2017

harus bersikap netral dan wajib membiarkan semua orang mempraktekkan ajaran agama sesuai yang mereka yakini.¹⁵²

Pasca tragedi serangan Paris, Macron tidak menyalahkan Islam, namun ia menyalahkan oknum muslim yang menyalahgunakan ajaran keyakinan untuk kemudian menghalalkan kekerasan dan pembunuhan.¹⁵³

Emmanuel Macron dalam suatu pidatonya mengenai sejarah, agama, dan negara, kembali mengenang kisah peperangan abad ke-16. Saat itu, perang Protestan-Katolik yang terjadi selama lebih dari delapan putaran pertempuran denominasi telah menghancurkan Perancis.

Dalam pidatonya, Macron mengisyaratkan bahwa dia tidak ingin Perancis kembali mengalami pertumpahan darah yang disebabkan oleh perpecahan agama. Pidatonya menegaskan bahwa toleransi merupakan hal mutlak dalam keberlangsungan negara. Pernyataannya bertujuan agar tidak terulang kesalahan masa lalu pada negara yang sekarang ia pimpin. Macron menerima Islam sebagai agama yang unik yang menjadi perhatian di kalangan masyarakat Perancis. Ia bersikeras bahwa sekularisme di Perancis bertujuan untuk mendukung kebebasan agama.¹⁵⁴

Peluang OKI dalam memaksimalkan perannya juga terlihat dari bagaimana pemimpinnya mengatur strategi. Sama halnya dengan

¹⁵² Michel Rose. *Macron outlines vision of French Islam, drops more ambition hints*. October 2016.

¹⁵³ Tarek Fatah. *In France, Macron is the radical, not Le Pen*. April 2017

¹⁵⁴ *Emmanuel Macron has a history buff's view of Islam and religious strife*. Mei 2017. Erasmus: France, Sekularism, and Religion

kepemimpinan di Perancis, dalam dua tahun periode yang dipilih oleh penulis, yaitu 2015 sampai 2017, OKI juga memiliki dua pemimpin yang berbeda. Saat tragedi serangan Paris terjadi, OKI dikepalai oleh Iyad bin Amin Madani. Di bawah kepemimpinan beliau, OKI menunjukkan perannya dalam mengatasi tindakan islamophobia pasca tragedi serangan Paris. Salah satu contohnya ialah Madani mengadakan Rapat Umum Terbuka Luar Biasa tingkat Menteri pada akhir tahun 2015. Pertemuan tersebut ditujukan untuk mengancam terorisme dan mengatasi fenomena tindakan islamophobia yang tercipta setelah itu.

Terpilihnya Yusuf bin Ahmad Al-Othaimen menggantikan Madani pada 17 November 2016, nampaknya membawa angin segar bagi OKI. Al-Othaimen menunjukkan semangat juangnya dalam mengatur strategi dalam badan OKI yang ditujukan untuk mengatasi tindakan islamophobia di Perancis yang semakin tak terelakkan. Beberapa kebijakan dan pertemuan yang tercipta pada masa kepemimpinan Al-Othaimen meliputi; melontarkan kutukan dan kecaman secara tegas atas aksi terorisme untuk menunjukkan ketidakberpihakan OKI kepada kelompok militan yang melakukan aksi teror; Sidang Menteri Luar Negeri ke-44 yang melahirkan Resolusi No. 32/44-Pol, yang berisikan strategi untuk menangani tindak islamophobia; mengadakan dialog antaragama untuk memupuk kesadaran global akan pentingnya membudayakan hidup dengan nilai toleransi; ikut serta dengan PBB dalam konferensi

perdamaian internasional; melakukan pertemuan dengan PBB yang ditujukan untuk menggelorakan perdamaian dunia; melakukan pertemuan di markas besar OKI untuk membahas perihal penggunaan media secara tepat guna meminimalisir dampak dari narasi-narasi berita yang provokatif; serta mengadakan Konferensi Para Menteri Informasi Islam untuk membahas perkembangan tindakan islamophobia di berbagai penjuru dunia.

Bagaimana perkembangan tindakan islamophobia setelah ada keterlibatan berbagai pihak yang berupaya untuk mengatasinya? Sebuah sumber statistik menjelaskan bahwa ada penurunan tindakan islamophobia di Perancis. Pada 2016, terdapat penurunan sebesar 45% jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang justru mengalami kenaikan sebesar 22 persen jika dibandingkan dengan data tahun 2014. Hal ini mengisyaratkan bahwa kenaikan itu memang terjadi pasca rangkaian serangan di Paris sepanjang tahun 2015. Penolakan atas penggunaan jilbab bagi wanita muslim juga mengalami penurunan 22 persen di tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015. Penolakan terhadap makanan halal pun mengalami penurunan. Hal ini didukung oleh data yang menyatakan bahwa 79 persen warga Perancis percaya bahwa umat Islam memiliki hak kebebasan untuk dapat mempraktekkan ajaran agamanya.¹⁵⁵

¹⁵⁵ Oliver gee. *French people are less xenophobic but still wary of Islam*. 13 maret 2017

	2015	2016	2017
Tindakan dan ancaman yang didasari oleh rasisme dan xenophobia	797	608	519
Tindakan dan ancaman yang didasari oleh islamophobia (anti-muslim)	429	185	121

Tabel IV.F.1. Berbagai tindakan dan ancaman, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *French Law Enforcement Authorities*. 2015-2017.

Sumber: European Union¹⁵⁶

Penurunan yang tergambar dari data statistik di atas tentu bukanlah diperoleh hanya dari usaha satu pihak, namun berbagai pihak yang terlibat, termasuk desakan OKI yang menyuarakan kegelisahan warga muslim. Akumulasi dari kebijakan pemerintah, dan pengaruh dari organisasi lokal, organisasi internasional, termasuk OKI, telah menciptakan sebuah tren positif berupa penurunan tingkat tindakan islamophobia. Namun hal ini tentu belum dapat dikatakan sebagai sebuah keberhasilan mengingat tindakan islamophobia didasari oleh suatu mindset yang tertanam dalam pikiran manusia.

¹⁵⁶ *Hate crime recording and data collection practice across the European Union.*

Hal ini sesuai dengan pernyataan Sekretaris OKI bidang observatori Islamophobia dan Urusan SosialBudaya, Abdula Manafi Mutualo, bahwa islamophobia adalah suatu fenomena sosial yang sulit untuk diukur. Hal itu dikarenakan oleh beberapa faktor, termasuk proses pemilihan umum di negara tersebut. Meskipun demikian, penurunan angka tindakan islamophobia sebagaimana yang penulis jabarkan di atas tentu telah menjadi suatu peluang, khususnya bagi OKI untuk terus berkomitmen dengan segala upaya demi tercapainya kebebasan beragama dan beribadah sebagaimana dijelaskan dalam teori Liberal, demi menghilangkan tindakan islamophobia yang diskriminatif sehingga tercapailah nilai-nilai demokratis yang dilengkapi dengan penyebaran bukti HAM secara merata bagi seluruh umat di penjuru dunia.

